

JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI NEGARA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK
DI DESA TUGUMUKTI KECAMATAN CISARUA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rana Rudiana ¹⁾, Yogi Mei Maulana ²⁾

Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi, Cimahi,
Jawa Barat 40531. Email : ransrudiana70@gmail.com, yogimeimaulana681@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017. Namun, ketidakpedulian terhadap peraturan pemerintah oleh sekelompok masyarakat di beberapa desa/kelurahan masih nampak terjadi, semisal di Desa Tugumukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat yang belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data, yaitu : studi kepustakaan, wawancara , observasi dan dokumentasi untuk menjawab tujuan penelitian. Wawancara telah dilakukan kepada masyarakat dan aparat desa menggunakan teknik *purposive sampling*. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti diukur dengan menggunakan tiga sekuen, yaitu : *voice*, *acces* dan *control*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat secara umum belum berjalan secara optimal, hal tersebut bisa dilihat dari: 1) *Voice*, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Tugumukti dalam menyampaikan aspirasinya hanya mencapai sekitar 50% 2) *Acces*, menunjukkan bahwa dalam tahapan pengambilan keputusan pada penentuan kebijakan prioritas masih dirasa belum mencapai mufakat seutuhnya. Selanjutnya, pelaksanaan pemeliharaan hasil pembangunan fisik belum dilakukan secara rutin dan menunggu instruksi dari pihak desa. 3) *Control*, menunjukkan bahwa masih ada tindakan koreksi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik, namun respon pemerintah desa terhadap tindakan koreksi masih kurang . Pada akhirnya penelitian ini memberikan masukan di masa mendatang untuk meneruskan penelitian pada tema partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya masyarakat di Desa Tugumukti.

Kata Kunci : *Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Desa.*

ABSTRACT

The Indonesian government has issued regulations related to community participation in the administration of local government through Government Regulation (PP) Number 45 of 2017. However, ignorance of government regulations by a group of people in several villages, such as in Tugumukti Village. This research aims to measure community participation in the implementation of physical development programs in Tugumukti Village, Cisarua District, West Bandung Regency, which has not been effective. This research uses a qualitative method with a case study approach has been used in this research. Researchers used four data collection techniques, namely: literature study, interviews, observation and documentation to answer the research objectives. Interviews were conducted with the community and village officials using purposive sampling technique. The level of community participation in physical development in Tugumukti village was measured using three sequences, namely: voice, access and control. The results of this study indicate that Community Participation in Physical Development in Tugumukti Village, Cisarua Sub-district, West Bandung Regency has generally not run optimally, this can be seen from: 1) Voice, showing that the involvement of the Tugumukti Village community in conveying their aspirations only reached around 50% 2) Access, which shows that in the decision-making stage of determining priority policies, there is still not complete consensus. Furthermore, the implementation of maintenance of physical development results has not been carried out routinely and awaits instructions from the village. 3) Control, shows that there are still corrective actions from the community in every stage of physical development implementation, but the village government's response to corrective actions is still lacking. Finally, this research provides input in the future to continue research on the theme of community participation in community resource development in Tugumukti Village.

Keywords: *Participation, Community, Village Development.*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung Barat (KBB) adalah salah satu kabupaten yang terletak di sebelah Barat Ibukota Bandung Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Berdasarkan data yang didapat, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.305,77 KM² dan terletak diantara 60° 41' s/d 70° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' s/d 108° 05' Bujur Timur. Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat

meliputi 16 kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Cisarua. Kecamatan Cisarua memiliki wilayah dengan luas 5.511 Ha dengan batas-batas wilayahnya: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Wetan dan Purwakata, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan

Padalarang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngamprah dan Kota Cimahi. Jumlah penduduk Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat mencapai 79.156 jiwa (*Sex ratio* ; 103,88) tersebar kedalam delapan desa yang mencakup 425 RT dan 108 RW. Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Tugumukti merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Cisarua. Secara geografis lokasi Desa Tugumukti berada pada : 107° 33' 22.757" BT dan 6° 47' 34.681" LS. Wilayah Desa Tugumukti bisa dibidang cukup luas bila dibandingkan dengan beberapa desa lainnya, yaitu mencapai 8,33 Km² yang terbagi kedalam 13 Rukun Warga (RW) dan 47 Rukun Tetangga (RT). Desa Tugumukti memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.204 jiwa (*Sex ratio* ; 100,50) yang terbagi kedalam 2.150 kepala keluarga. Berdasarkan pengelompokan usia produktif (15-64 Tahun) dan usia non-produktif (usia muda dan usia tua) jumlah penduduk Desa Tugumukti yang termasuk kedalam kelompok usia produktif pada tahun 2021 sebesar 4.472 jiwa atau sebesar 62,07%. Sedangkan yang termasuk kedalam kelompok usia non-produktif sebesar 2.732 jiwa atau 37,92%.

Berbagai negara di dunia salah satunya Indonesia sudah mencoba membuka partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahannya. Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait, yaitu Mengenai partisipasi masyarakat telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam PP tersebut telah diatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Kemudian beberapa cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri ialah meliputi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi

masyarakat merupakan hal yang erat kaitannya dengan program pembangunan. Program pembangunan dinilai berhasil atau tidaknya terlihat dari bagaimana partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan yang salah satunya adalah aspek fisik. Pembangunan Desa pada aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana dan prasarana) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat bersama Bapak Yeyep selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Masalah yang terjadi dimasyarakat menunjukkan belum

efektifnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, masalah tersebut dapat diuraikan berikut ini :

1. Partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan fisik. Partisipasi pada tahap ini masih rendah, hal tersebut dapat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan fisik desa (studi kasus; pembangunan Pos Pelayanan Terpadu bulan Mei 2023) yang kurang dari 30% dari total populasi wilayah setempat.
2. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil program pembangunan sudah baik, pada kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih kurang dan masih mengandalkan pihak desa. Semisal pemeliharaan fasilitas kamar mandi di Taman Kanak-Kanak binaan Desa yang sampai sekarang masih terbengkalai karena belum ada perbaikan pada saluran airnya.

Mengamati pentingnya partisipasi masyarakat dalam merealisasikan setiap program pembangunan fisik, yang mana program tersebut sangat menunjang dalam kesejahteraan masyarakat serta didukung juga oleh beberapa studi terdahulu dari kalangan akademisi yang membahas topik yang sama mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, semisal penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsi. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di

Desa Garecing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam ranah kajian administrasi negara dalam bentuk skripsi dengan judul: “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat “.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Administrasi Negara

Dari sudut pandang ilmu administrasi, administrasi negara adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, melalui perundang-undangan dan dalam bentuk hukum publik lain. Oleh karena itu, bersifat publik atau kenegaraan.

Untuk mengetahui definisi administrasi negara lebih jauh, ada baiknya kita menelaah definisi administrasi negara sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah ahli, antarlain sebagai berikut :

1. Menurut Dimock dan Dimock dalam Anggara (2012:134), administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan.
2. Menurut Thoha dalam Anggara (2012:134), mengemukakan bahwa ilmu administrasi negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. Dengan demikian, pengetahuan administrasi yang diterapkan

dalam kegiatan politik atau negara atau pemerintahan itulah administrasi negara.

3. Menurut Waldo dalam Anggara (2012:134), mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.
4. Pffiner dan Presthus seperti dikutip Pamudji dalam Anggara (2012:134), mendefinisikan administrasi negara sebagai “ *in sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, and compassing innumbrable skills and techniques which give order and purpose to the efforts to large number of people.*” Singkatnya, administrasi negara adalah proses yang berkaitan dengan melaksanakan kebijakan publik dan mencakup keterampilan dan teknik yang tidak dapat dimatikan yang memberi ketertiban dan tujuan pada upaya sejumlah besar orang.

Konsep paling baik untuk menjelaskan administrasi negara adalah konsep administrasi negara sebagai suatu proses. Dimock dalam Pamudji (1995:31) dalam Anggara (2012:136), mengemukakan, “*A process, it is all the steps taken between the turn in enforcement agency assumes jurisdiction and the lost brick is placed*” sebagai proses administrasi negara meliputi semua langkah yang diambil di antara saat badan pelaksanaan menerima

kewenangan dan saat batu terakhir diletakkan. Dengan demikian, sebagai suatu proses, administrasi negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai pada penyelenggaraan mencapai tujuan tersebut.

Bagi suatu negara yang berdemokrasi, tujuan administrasi negara adalah untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyatnya. Beberapa keinginan yang ditetapkan oleh rakyat beberapa diantaranya; keamanan, kesejahteraan, ketertiban, keadilan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan begitu, peran pelaksana administrasi negara adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada kepentingan rakyat. Agar tujuan administrasi tersebut dapat tercapai dengan maksimal, sangat dibutuhkan sinergitas antara para pelaksana administrasi negara dan masyarakat, salah satunya dengan menciptakan situasi sosial berikut ini:

1. *Social Participation*, yaitu tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut serta di dalam administrasi negara.
2. *Social Responsibility*, yaitu pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pelaksana administrasi negara kepada masyarakat.
3. *Social Support*, yaitu dukungan yang diberikan oleh rakyat terhadap pelaksanaan administrasi negara.
4. *Social Control*, yaitu kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan administrasi negara.

Namun untuk terciptanya keempat situasi sosial tersebut, harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal ini pelaksana administrasi negara dan masyarakat. Peningkatan kompetensi para pelaksana administrasi negara dan masyarakat dapat dilakukan dengan pembuatan program pemberdayaan di berbagai bidang, seperti bidang pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi dan pendidikan. Sehingga nantinya dapat menciptakan administrator negara yang berkompeten dalam bekerja dan menciptakan masyarakat yang partisipatif terhadap setiap program pembangunan yang dibuat.

2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

Persoalan partisipasi masyarakat memang menjadi isu yang terus berkembang dan diperbincangkan oleh banyak orang. Berbagai program pembangunan maupun program pemberdayaan baik yang dilakukan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menekankan bahkan mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program baik pada perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan maupun program pemberdayaan masyarakat, *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan partisipasi masyarakat sebagai prinsip penting *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sejalan dengan pernyataan UNDP tersebut, selanjutnya pemerintah Indonesia mengatur lebih lanjut

mengenai partisipasi masyarakat dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP Nomor 45 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1).

Untuk mengetahui definisi partisipasi masyarakat lebih jauh, ada baiknya kita menelaah definisi partisipasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah ahli, sebagai berikut :

Menurut Syafiie dalam Kusen dkk (2021:3) Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban Bersama.

Menurut Adisasmita dalam Kusen (2021:3) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal.

Sejalan dengan beberapa pendapat para ahli tersebut diatas, Sudriamunawar (2006:11) mengatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

1. Dengan peran serta masyarakat akan lebih banyak hasil kerja yang dicapai.

2. Dengan peran serta masyarakat pelayanan atau servis dapat diberikan dengan biaya murah.
3. Peran serta masyarakat memiliki nilai dasar yang sangat berarti dalam menjalin persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat.
4. Peran serta masyarakat merupakan katalisator untuk kelangsungan pembangunan selanjutnya.
5. Peran serta masyarakat dapat menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan di masyarakat.
6. Peran serta masyarakat lebih menyadarkan masyarakat itu sendiri terhadap penyebab dan kemiskinan sehingga menimbulkan kesadaran untuk mengatasinya. (Sumber : Haryono Sudriamunawar, Kepemimpinan) Sudriamunawar (2006:42) mengemukakan tentang persyaratan partisipasi sebagai berikut :

1. Aspek partisipasi yang paling mendasar adalah luasnya pengetahuan dan latar belakang yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi sebagai prioritas dan melihat berbagai masalah dalam konteksnya yang tepat.
2. Adanya kemampuan untuk belajar secara lebih cepat tentang berbagai masalah sosial dalam pengambilan keputusan.
3. Kemauan untuk bertindak secara lebih efektif. (Sumber : Haryono Sudriamunawar, Kepemimpinan)

Dari beberapa pendapat para ahli tentang partisipasi masyarakat, peneliti akan mengembangkan teori dari pendapat Juliantara (2002:87), substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu system pemerintah dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi sebagai garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat Juliantara (2002:89-90).

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, *access* dan *control* (Juliantara, 2002 : 90-91).

2.3 Konsep Pembangunan Fisik Desa

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa diperoleh melalui pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 78 ayat 3 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa diaturkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian, pembangunan desa merupakan suatu kegiatan yang bertahap yang mana melibatkan Pemerintah Desa dan juga masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang saat ini gencar diserukan oleh pemerintah adalah membangun dari daerah pinggiran, yang artinya desa menjadi prioritas untuk percepatan pembangunan. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan yang salah satunya adalah aspek fisik. Pembangunan pada aspek fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum. Menurut Adisasmita dalam Karnita (2017:105), tujuan pembangunan sarana dan prasarana

(fisik) adalah sebagai berikut : Memberikan pelayanan kepada masyarakat perdesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pelayanan sosial. Sasaran program ini adalah tersedianya prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan produksi dan pemasaran, pelayanan sosial, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembangunan fisik desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang direalisasikan melalui beberapa tahapan proses pembentukan program pembangunan fisik (tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) diberbagai bidang yang tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi sarana prasana fisik yang mampu menunjang berbagai kebutuhan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah mengenai prosedur dan pelaksanaannya sesuai tahap-tahap penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan kualitatif karena ingin mendalami secara detail, intensif dan komprehensif atas pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Pada saat mendalami permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, penulis tidak dibatasi oleh alat ukur

sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, sehingga penulis dapat memperoleh informasi-informasi baru yang berkaitan dengan pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Informasi-informasi baru yang diperoleh saat penelitian misalnya berkaitan dengan latar belakang fenomena gejala sosial yang muncul atau hal-hal lain yang pada awalnya tidak diketahui penulis.

Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail dan menginterpretasikan data atau gejala yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Jenis penelitian ini juga dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yang menurut penulis lebih tepat dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga penulis akan menggambarkan secara detail pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Selain itu penulis juga berusaha untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dikarenakan penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat maka penelitian ini dapat disebut dengan studi kasus. Penulis ingin menggambarkan atas kasus yang terjadi di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat,

sehingga penelitian ini disebut dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kasus (*case study*).

4. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, akan menggunakan empat teknik pengumpulan data, yaitu : studi kepustakaan (*Library Research*), wawancara (*interview*), observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

5. ANALISIS DATA

Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu kepada pendapat Miles and Huberman dalam Sugiyono (2013:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Profil Pemerintahan Desa Tugumukti kaitannya dengan Partipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik

Perjalanan panjang Desa Tugumukti sebagai hasil pemekaran dari Desa Pasirhalang dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 141.1/154/Pemdes. Pengambilan nama Desa

Tugumukti berasal dari Bahasa Sunda, yaitu “*Tugu*” dan “*Mukti*”. *Tugu* artinya ciri dan *Mukti* artinya sejahtera, sehingga “ *Tugumukti* “ dapat diartikan sebagai ciri kesejahteraan.

Secara geografis lokasi Desa Tugumukti berada pada : 107° 33’ 22.757” BT dan 6° 47’ 34.681” LS dengan batas-batas wilayahnya, yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten purwakarta
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua dan Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua.

Adapun untuk ketinggian wilayahnya, Desa Tugumukti berada pada ketinggian antara 1.200 s/d 1.311 MDPL dan merupakan daerah dataran tinggi yang mempunyai curah hujan rata-rata 1.200 MM pertahunnya dengan suhu udara berkisar antara 18 °C s/d 24 °C.

Desa Tugumukti memiliki luas wilayah yang mencapai ± 382 Ha dengan tataguna wilayah sebagai berikut :

- a. Pemukiman penduduk : 97,25 Ha;
- b. Persawahan : 8 Ha;
- c. Perkebunan atau pertanian rakyat : 144,358 Ha;
- d. Pemakaman : 3,35 Ha;
- e. Pekarangan : 75,25 Ha;

- f. Perkantoran : 5,815 Ha;
- g. Prasarana umum lainnya : 47,977 Ha.

Pemukiman penduduk yang seluas 97,25 Ha tersebut terbagi kedalam 4 Dusun yang terbagi lagi kedalam 13 Rukun Warga (RW) dan 47 Rukun Tetangga (RT). Dari luas wilayah pemukiman tersebut Desa Tugumukti memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.204 jiwa (*Sex ratio* ; 100,50) dengan 2.150 kepala keluarga.

Berdasarkan pengelompokan usia produktif (15-64 Tahun) dan usia non-produktif (usia muda dan usia tua) jumlah penduduk Desa Tugumukti yang termasuk kedalam kelompok usia produktif pada tahun 2021 sebesar 4.472 jiwa atau sebesar 62,07%. Sedangkan yang termasuk kedalam kelompok usia non-produktif sebesar 2.732 jiwa atau 37,92%.

Bila dilihat dari sebaran tataguna wilayah, sebanyak 40% luas wilayah Desa Tugumukti digunakan sebagai lahan pertanian. Sehingga tak heran jika komoditas unggulan Desa Tugumukti adalah hasil pertanian dan peternakan. Komoditas pertanian yang dihasilkan di Desa Tugumukti meliputi paprika, selada, tomat, brokoli, kakao, berbagai macam bunga dan jeruk, yang mana salah satu dari hasil komoditas pertanian tersebut merupakan komoditas ekspor. Selain komoditas pertanian, komoditas peternakan juga merupakan komoditas unggulan dari Desa Tugumukti yang mana komoditas tersebut mampu menghasilkan: sapi perah (susu), sapi potong, domba dan kambing. Namun mayoritas yang dihasilkan oleh para peternak Desa Tugumukti adalah sapi

perah (susu). Oleh sebab itu dilihat dari potensi alam yang tersedia, masyarakat Desa Tugumukti mayoritas bermata pencaharian dibidang pertanian (Persentase: sebanyak 56% dari 4.848 Jiwa), sebagai petani, buruh tani dan peternak sehingga waktu keseharian masyarakat banyak dihabiskan dikebun.

Salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan usaha masyarakat adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan penyediaan infrastruktur yang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu penyediaan berdasarkan kebutuhan (*demand approach*), termasuk memelihara prasana infrastruktur yang sudah ada menjadi suatu kebutuhan. Kedua yaitu penyediaan yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi (*supply approach*). Kedua pendekatan tersebut tergantung pada dana penyediaan. Ketika dana terbatas, maka penyediaan infrastruktur lebih diprioritaskan pada pendekatan pertama. Sedangkan ketika keadaan ekonomi sudah membaik, maka penyediaan prasarana infrastruktur dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur dapat menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, misalnya ketersediaan dan reliabilitas ketersediaan air oleh jaringan irigasi. Ketimpangan pendapatan masyarakat

di suatu wilayah juga dapat disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi dan akses kepada sumber-sumber produksi. Ketersediaan jaringan jalan akan membuka dan menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Menurut data hasil pembangunan fisik tahun 2021, Desa Tugumukti selama 39 tahun pemerintahannya sudah mampu menghasilkan sarana prasarana yang cukup memadai. Pendekatan yang digunakan oleh pemerintah desa dalam percepatan pembangunan ekonomi dan usaha masyarakat melalui pembangunan infrastruktur lebih condong kepada pendekatan pertama, yaitu *demand approach*, hal tersebut karena dana pembangunan pemerintah desa masih terbatas dan masih mengandalkan anggaran serta bantuan pemerintah daerah lainnya, maka penyediaan infrastruktur lebih diprioritaskan pada pendekatan pertama. Secara garis besar hasil pembangunan infrastruktur yang tersedia di Desa Tugumukti dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi, meliputi :

a. *Public utilities* meliputi :

- a) Program pembangunan sumur bor masyarakat;
- b) Program pembangunan air swadaya masyarakat;
- c) Program pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) untuk masyarakat; dan
- d) Program pembangunan penyediaan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).

b. *Public work*, meliputi :

- a) Program pembangunan irigasi penunjang pertanian masyarakat;
- b) Program pembangunan drainase;
- c) Jalan Lingkungan Desa, meliputi :

- 1) Jalan Lingkungan Tugu – Pasirhalang : 4000 x 3 M
- 2) Jalan Lingkungan Cimeta – Nyalindung : 2000 x 3 M
- 3) Jalan Lingkungan RW 11 : 400 x 2,5 M
- 4) Jalan Lingkungan Tugu IV – RW 12 : 1.100 x 3M
- 5) Jalan Lingkungan Tugumukti – Sindang Sari : 1.000 x 3M
- 6) Jalan Lingkungan Cimeta – Cibolang : 1000 x 3 M
- 7) Jalan Lingkungan Cimeta – Nyalindung : 2000 x 3 M
- 8) Jalan Lingkungan Tugu II – Tugu IV : 900 x 3 M
- 9) Jalan Lingkungan RW 01 s/d RW 13

d) Jalan Gang, meliputi :

- 1) Panjang Jalan Gang dari RW 01 s/d RW 13
- 2) Panjang Jalan Desa Aspal : 7000 M

c. Sektor transportasi, meliputi;

- a) Jalan Provinsi : -
- b) Jalan Kabupaten : 2,9 KM

2. Infrastruktur sosial, merupakan infrastruktur yang mengarah kepada pembangunan manusia dan lingkungannya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi.

- a. Sarana Pendidikan, meliputi :
- a) Taman Kanak-Kanak (TK) : 4
 - b) Jumlah Sekolah Dasar (SD) / Sederajat : 4
 - 1) SDN Tugurahayu
 - 2) SDN Tugumukti
 - 3) MI Nyalindung
 - 4) MI Pasirhalang
 - c) Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 1
 - d)
 - e) Jumlah PKBM Setara SLTP/SLTA : 1
 - f) Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) : 1
 - g) Jumlah Perguruan Tinggi : -
- b. Sarana Kesehatan, meliputi :
- a) Balai Pengobatan : 1
 - b) Praktek Bidan : 2
 - c) Dukun Bayi : 3 Orang
 - d) Bidan Desa : 1
 - e) Jumlah Posyandu : 13 Unit
- c. Perumahan, meliputi :
- a) Program pembangunan rumah roboh masyarakat;
 - b) Program pembangunan rumah sehat masyarakat;
 - c) Program pembangunan kamar mandi umum;
3. Infrastruktur administrasi, merupakan infrastruktur dalam bentuk penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi, meliputi :
- a. Kantor administratif dan pelayanan desa;
 - b. Gedung serbaguna desa; dan
 - c. Gelanggang olahraga masyarakat (GOM).
- Bila dilihat dari hasil pembangunan dua tahun kebelakang, Desa Tugumukti sudah berhasil melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam beberapa bidang, seperti :

Tabel 6.1
Data Hasil Pembangunan Fisik Desa Tugumukti 2022-2023

No	Pembangunan	Bidang	Tahun	Lokasi
1.	Rambat beton jalan desa	<i>Public Work</i>	2022	RT. 2 / RW. 4
2.	Rambat beton jalan gang	<i>Public Work</i>	2022	RW. 1 s/d 13
3.	Drainase / Kirmir	<i>Public Work</i>	2022	RT. 2 / RW. 4
4.	Pelayanan terpadu desa	Administrasi	2022	Kantor Desa Tugumukti
5.	Rumah roboh	Sosial	2022	Delapan RW penerima program pembangunan tersebut
6.	Pembangunan sumur bor masyarakat	<i>Utilities</i>	2018-2022	9 RW penerima manfaat pembangunan
7.	Drainase / Kirmir	<i>Public Work</i>	2023	RT. 2 / RW. 11, RW 9

No	Pembangunan	Bidang	Tahun	Lokasi
8.	Rumah sehat	Sosial	2023	RW. 3, RW.5 , RW.10 dan RW.11
9.	Pembangunan sumur bor masyarakat	<i>Utilities</i>	2023	4 RW penerima manfaat pembangunan
10.	Rumah korban bencana	Sosial	2023	RT. 2 / RW. 13
11.	Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	Kesehatan	2023	RW. 1, RW. 2 dan RW. 13
12.	Renovasi kantor desa	Administrasi	2023	Kantor Desa Tugumukti
13.	Pembangunan jalan kabupaten	Transportasi	2023	RW 9
14.	Pembangunan jalan lingkungan desa	<i>Publik works</i>	2023	RW 09 meliputi RT.01 dan RT.02
15.	Renovasi kantor desa tahap II (Dalam pelaksanaan)	Administrasi	2023	Kantor Desa Tugumukti

6.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat

6.2.1 Voice

Voice adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Mengaplikasikan sekuen ini pada setiap proses pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur desa sangatlah penting, mengingat pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Pada pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, secara garis besar peneliti membagi kedalam dua kategori informan, yaitu informan yang berasal dari pemerintahan desa dan informan dari perwakilan masyarakat desa sehingga nanti peneliti bisa mendapatkan dua

perspektif yang berbeda mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya pada proses perencanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti.

Dari beberapa pernyataan informan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari perbedaan pandangan yang diberikan oleh pihak pemerintahan desa dan pihak perwakilan masyarakat. Pihak desa mengklaim bahwa penyampain aspirasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan fisik sudah bagus, karena dilihat dari banyaknya usulan-usulan masyarakat yang masuk dalam perumusan RPJMDes. Namun pandangan berbeda disampaikan oleh perwakilan masyarakat dalam hal ini Ketua RT dan RW yang mengklaim bahwa tingkat penyampain aspirasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan fisik masih belum optimal hal tersebut bisa

dilihat dari persentase masyarakat yang aktif dalam menyampaikan aspirasinya yang hanya sekitar 50% dari total keseluruhan penduduk Desa Tugumukti. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti dalam segi teknis penyampaian bisa dibilang belum efektif karena masyarakat mengkomunikasikan aspirasinya disela-sela aktivitas keseharian mereka tidak melalui kegiatan formal seperti musyawarah, hal itu juga berpotensi kepada hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menyampaikan aspirasinya. Selain permasalahan pada teknis penyampaian aspirasi yang belum efektif, ada beberapa faktor internal dan eksternal masyarakat yang menjadi penghambat untuk menyampaikan aspirasinya, seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, lama tinggal, keberadaan sosok pemimpin dan kapasitas fasilitator dalam mendorong dan menampung aspirasi masyarakat.

6.2.2 Acces

Acces maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik. Diberikannya akses kepada masyarakat untuk turut andil dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan memang suatu langkah yang tepat untuk dilakukan, karena dengan diberikannya akses kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam menentukan kebijakan secara tidak langsung memberikan keleluasaan

kepada masyarakat untuk mengkomunikasikan semua skala prioritas kebutuhan program pembangunan fisik yang dibutuhkan di lingkungannya, sehingga nantinya setiap program atau kebijakan pembangunan fisik yang akan direalisasikan mampu menjawab permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat.

Dari beberapa pernyataan informan mengenai keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik bisa dibilang belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan memang secara teknis sudah mengikuti prosedur pemerintah, namun dalam tahapan pengambilan keputusan pada penentuan kebijakan prioritas untuk dimasukkan ke APBDes masih dirasa belum mencapai musyawarah untuk mufakat sepenuhnya hal tersebut dikarenakan fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat belum berjalan sepenuhnya. Mengenai penyampaian rencana program pembangunan fisik yang akan direalisasikan untuk anggaran satu tahun kedepan dinilai sudah baik, masyarakat bisa mengakses informasi tersebut melalui RT, RW, Kepala Dusun atau bahkan kepada perangkat desa sekalipun. Adapun upaya pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam memberikan informasi rencana pembangunan fisik biasanya dimaksimalkan dengan menyampaikannya lewat kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat langsung, seperti pada kegiatan untuk

memperingati PHBN. Selanjutnya mengenai keterlibatan masyarakat dalam memelihara pembangunan dinilai belum efektif. Belum efektifnya pelaksanaan pemeliharaan hasil pembangunan fisik tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan pemeliharaan tidak rutin hanya diwaktu-waktu tertentu saja seperti hari kemerdekaan dan menunggu instruksi dari pihak desa.

6.2.3 Control

Control maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan memang sangat berperan penting dalam meminimalisir tindakan penyelewengan pada pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan.

Dari beberapa pernyataan informan diatas dapat ditarik makna bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan bisa dibilang sangat baik. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya tindakan koreksi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, sehingga dengan adanya pengawasan dari masyarakat menjadikan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan responsif.

6.3 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat

Meski secara umum, kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik berjalan cukup baik, namun ada beberapa faktor penghambat dalam kerjasama tersebut. Faktor penghambat tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat saja, namun juga dari pihak pemerintah desa. Dalam penelitian Kasmiah (2014:49) terungkap fakta bahwa hambatan dari masyarakat diakibatkan oleh kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan yang masih minim.

Jika dalam penelitian Kasmiah (2014:49) faktor penghambat diakibatkan minimnya kesadaran masyarakat akan manfaat pembangunan, di Desa Tugumukti faktor penghambat berasal minimnya kesadaran masyarakat bahwa kegiatan pembangunan fisik bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dan orang-orang tertentu saja yang mereka anggap sebagai tokoh masyarakat, tetapi juga menuntut keterlibatan dari semua kalangan masyarakat. Minimnya kesadaran akan peran masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :

1. Usia dan Gender

Mayoritas masyarakat Desa Tugumukti yang sering terlibat dalam

setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik bila dilihat dari segi usia adalah masyarakat kelompok usia produktif yang sebanyak 4.472 jiwa atau hanya sebesar 62,07% dari jumlah total keseluruhan masyarakat Desa Tugumukti dan itu juga belum dikurangi oleh faktor gender karena kebanyakan yang berpartisipasi itu adalah kaum pria. Hal tersebut bisa terjadi karena sudah kurangnya kemampuan masyarakat non produktif untuk ikut berpartisipasi aktif dan untuk segi gender bisa terjadi karena masih adanya stigma masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu sehingga lebih menyerahkan segala urusan pelaksanaan pembangunan fisik kepada masyarakat dengan usia produktif dan laki-laki.

2. Ekonomi masyarakat (Jumlah tanggungan keluarga, Jenis pekerjaan dan Jumlah penghasilan)

Faktor ekonomi ini menjadi alasan utama bagi masyarakat Desa Tugumukti untuk tidak berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik, dimana mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada berpartisipasi dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari daripada ikut terlibat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik. Karena mayoritas masyarakat Desa Tugumukti bermata pencaharian dibidang pertanian (Persentase: sebanyak 56% dari 4.848 Jiwa), yang mana kebanyakan masyarakat bekerja sebagai buruh tani yang aktivitas kesehariannya dihabiskan dikebun

dan berpenghasilan pas-pasan, sehingga masyarakat lebih memilih bekerja daripada ikut terlibat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat menjadi alasan bagi masyarakat Desa Tugumukti untuk tidak berpartisipasi dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik karena berdasarkan data tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Tugumukti bahwa angka minat pendidikan masyarakat di Desa Tugumukti masih bisa dibilang rendah, hal tersebut bisa terlihat dari persentase jumlah masyarakat dengan tingkat pendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD) sebesar 28,7% masih lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan lulusan SLTA yang hanya 26,9%. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap program-program pembangunan fisik yang ada di Desa Tugumukti.

Sedangkan faktor penghambat dari pihak pemerintah lebih kepada belum optimalnya peran dan fungsi pemerintah dalam penentu arah kebijakan. Masyarakat sendiri dalam hal ini berperan sebagai pemberi masukan-masukan kepada Pemerintah Desa. Kalau dalam perspektif partisipasi seperti yang diklasifikasikan oleh Sudriamunawar (2006:85) peran masyarakat ini disebut sebagai bentuk partisipasi buah pikiran. Adapun masukan tersebut berupa usulan, ide, kritikan, saran yang mulai terkumpul sejak pertemuan antar-warga di lingkungan RT. Masukan-masukan masyarakat ini nantinya mengerucut dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dimana wakil-wakil masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT-RW, hingga BPD, mengaspirasikan masukan masyarakat yang dianggap sesuai dengan arah pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat. Pemerintah memberikan arahan kepada perwakilan masyarakat mana saja yang hendaknya diprioritaskan dalam pembangunan ke depan. Dengan arahan tersebut, perwakilan masyarakat yang telah membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya memilih usulan terbaik dari warga untuk diajukan dalam Musrenbang. Namun dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, peran pemerintah Desa Tugumukti sebagai penentu arah kebijakan belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari proses penentuan prioritas kebijakan yang belum secara penuh dipilih secara mufakat bersama perwakilan masyarakat dan seolah-olah masyarakat di dorong untuk menyetujui rancangan pembangunan fisik yang akan direalisasikan. Jadi seharusnya, meskipun berperan sebagai penentu arah, Pemerintah Desa tidak berhak menentukan sendiri usulan mana yang harus diprioritaskan. Peran sebagai penentu arah ini sebatas mengarahkan (atau istilah lebih tepatnya: memberi pengertian) perwakilan masyarakat tersebut usulan mana yang sebaiknya diprioritaskan.

Selain itu, belum optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan

fisik di Desa Tugumukti. Jika dilihat dari temuan hasil penelitian pada pelaksanaan perencanaan pembangunan fisik, BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya baru sebatas pertemuan formal dan belum dapat menampung serta menyalurkan sepenuhnya aspirasi atau keinginan masyarakat berdasarkan prioritas kebutuhan wilayah masing-masing. BPD seharusnya mengetahui secara baik mengenai kesiapan masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana yang ada, serta menggali potensi mana yang perlu dikembangkan dimasing-masing wilayah dengan melakukan survei atas usulan-usulan masyarakat yang masuk. Ketika BPD mengetahui secara baik mengenai permasalahan di wilayah masing-masing, selain bisa memfilter usulan-usulan masyarakat yang masuk yang sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayahnya masing-masing, BPD juga bisa menentukan arah pembangunan mana yang tepat untuk masyarakat berdasarkan fakta dan keadaan hasil survei tersebut, sehingga arah pembangunan yang ditentukan BPD otomatis mendapat dukungan masyarakat.

6.4 Upaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Tugumukti masing-masing belum memberikan peran yang optimal. Dalam pembangunan fisik seharusnya seluruh masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam

perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan. Namun tingkat kesadaran akan peran masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti belum berperan sebagaimana mestinya, hal tersebut bisa terlihat dari persentase masyarakat yang aktif dalam menyampaikan aspirasinya yang hanya sekitar 50% dari total keseluruhan penduduk Desa Tugumukti.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti, dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi program pembangunan fisik kepada masyarakat dengan meningkatnya intensitas sosialisasi program pembangunan fisik oleh pemerintahan desa dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena sosialisasi aktif dari pemerintah akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga lambat laun peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik akan meningkat. Salah satu bentuk nyata yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan memberikan sosialisasi program pembangunan fisik di sela-sela kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti kegiatan PHBN, kegiatan pengajian masyarakat, kegiatan silaturahmi antar masyarakat dan pemerintah desa juga membuka ruang kepada masyarakat untuk konsultasi mengenai program apa saja yang akan direalisasikan pada periode anggaran satu tahun kedepan.
2. Pemerintahan Desa Tugumukti memberikan stimulus atau rangsangan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dengan cara menjadikan setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan fisik sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memberikan tindakan pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik.
3. Penguatan jejaring struktur merupakan gabungan struktur terkecil pemerintahan yang menjadi fasilitator, seperti RT, RW, Karang Taruna dan PKK yang bertujuan untuk memperkuat program pembangunan fisik di Desa Tugumukti. Dengan penguatan jejaring struktur ini, informasi terkait program pembangunan fisik dapat tersampaikan kepada individu, keluarga, masyarakat dan struktur sosial di masyarakat (seperti LSM dan Ormas). Selain itu, penguatan jejaring struktur ini dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintahan

Desa Tugumukti. Salah satu bentuk nyata yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penguatan struktur ini adalah dengan diadakannya evaluasi kinerja terhadap struktur terkecil pemerintahan secara berkala.

Selanjutnya, Pemerintah Desa dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik seharusnya berperan untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarah dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, peran dan fungsi pemerintahan Desa Tugumukti dalam penentu arah kebijakan belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari penentuan prioritas kebijakan yang belum secara penuh dipilih secara mufakat bersama perwakilan masyarakat dan seolah-olah masyarakat di dorong untuk menyetujui rancangan pembangunan fisik yang akan direalisasikan. Jadi seharusnya, meskipun berperan sebagai penentu arah, Pemerintah Desa tidak berhak menentukan sendiri usulan mana yang harus diprioritaskan. Peran sebagai penentu arah ini sebatas mengarahkan. Selain peran Pemerintah Desa, faktor eksternal masyarakat selanjutnya yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Tugumukti yaitu karena peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal.

BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya baru sebatas pertemuan formal dan belum dapat menampung serta menyalurkan sepenuhnya aspirasi atau keinginan masyarakat berdasarkan prioritas kebutuhan wilayah masing-masing.

Adapun upaya yang dilakukan oleh gabungan struktur terkecil pemerintahan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas peran Pemerintahan Desa Tugumukti dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti, dilakukan dengan cara :

1. Memperkuat peran gabungan struktur terkecil pemerintahan yang menjadi fasilitator seperti RT, RW, Karang Taruna dan PKK dalam melakukan tindakan pengawasan (*control*) terhadap kinerja Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti. Salah satu bentuk nyata yang dilakukan oleh gabungan struktur terkecil pemerintahan adalah dengan selalu ikut terlibat dalam musyawarah desa, terlibat langsung pada pelaksanaan setiap program pembangunan fisik dan memberikan tindakan koreksi terhadap setiap keputusan yang dianggap melenceng dari prinsip transparansi, akuntabel dan responsif.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat secara umum belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada pengukuran partisipasi masyarakat menurut konsep Juliantara (2002:87), yang menyatakan bahwa makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, *access* dan *control*. Adapun hasil pengukuran ketiga sekuen tersebut bila dikaitkan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebagai berikut :

1) *Voice*, menunjukkan bahwa secara prosedur pelaksanaan musyawarah di Desa Tugumukti dalam perencanaan pembangunan fisik dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari musyawarah tingkat RT sampai musyawarah tingkat Desa. Namun keterlibatan masyarakat dalam

menyampaikan aspirasi khususnya pada musyawarah tingkat RT dan RW belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari persentase masyarakat yang aktif dalam menyampaikan aspirasinya hanya mencapai sekitar 50% dari total keseluruhan penduduk Desa Tugumukti.

2) *Access*, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik bisa dibilang belum efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan memang secara teknis sudah mengikuti prosedur pemerintah, namun dalam tahapan pengambilan keputusan pada penentuan kebijakan prioritas untuk dimasukkan ke APBDes masih dirasa belum mencapai musyawarah untuk mufakat sehingga bisa dianggap belum transparan secara utuh. Mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai rencana program pembangunan fisik yang akan direalisasikan pada anggaran satu tahun kedepan dinilai sudah baik, masyarakat bisa mengakses informasi tersebut melalui RT, RW, Kepala Dusun atau bahkan kepada

perangkat desa sekalipun. Selanjutnya mengenai keterlibatan masyarakat dalam memelihara pembangunan dinilai belum efektif. Belum efektifnya pelaksanaan pemeliharaan hasil pembangunan fisik tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan pemeliharaan yang belum rutin hanya diwaktu-waktu tertentu saja seperti hari kemerdekaan dan menunggu instruksi dari pihak desa.

- 3) *Control*, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan sudah terbilang cukup baik. Hal tersebut bisa dilihat dari masih adanya tindakan koreksi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan fisik, sehingga dengan adanya pengawasan dari masyarakat dapat mendorong pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan responsif. Transparan bisa dilihat dari keterbukaan pihak pemerintah desa dalam mengkomunikasikan dan menginformasikan data-data pembangunan yang akan direalisasikan. Selain transparansi, aspek akuntabel juga nampak dalam perealisasi setiap tahap pembangunan fisik di Desa Tugumukti bisa dilihat dari adanya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai setiap progress pelaksanaan pembangunan fisik mulai dari tahap perencanaan sampai nanti tahap evaluasi.

Selanjutnya tingkat responsif pemerintahan dalam menanggapi tindakan koreksi belum sepenuhnya berjalan optimal hal tersebut bisa dilihat dari belum tersedianya tim khusus yang mengelola semua tindakan koreksi masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa ketidakadaan tim khusus tersebut dalam setiap pelaksanaan pembangunan fisik membuat pemerintah desa dinilai kurang responsif terhadap tindakan koreksi yang diberikan oleh masyarakat.

2. Faktor penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti adalah masih minimnya kesadaran terhadap peran masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti. Minimnya kesadaran akan peran masyarakat tersebut secara garis besar disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal masyarakat dan faktor eksternal masyarakat. Faktor internal masyarakat yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti, meliputi : umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, komunikasi dan lama tinggal. Sedangkan faktor eksternal masyarakat yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti, meliputi : kapasitas

dan kapabilitas pemimpin dan keaktifan fasilitator.

3. Upaya dalam meningkatkan tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Tugumukti secara garis besar dilakukan oleh pemerintah Desa Tugumukti dan masyarakatnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Tugumukti seperti :

- 1) Meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai peran penting masyarakat dalam program pembangunan fisik di Desa Tugumukti dengan memanfaatkan semua kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai ajang untuk mensosialisasikan program pembangunan fisik di Desa Tugumukti.
- 2) Pemerintahan Desa Tugumukti memberikan stimulus atau rangsangan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik dengan cara menjadikan setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan fisik sebagai ajang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Penguatan kapasitas jejaring struktur adalah gabungan struktur terkecil pemerintahan yang menjadi fasilitator, seperti RT, RW, Karang Taruna dan PKK yang bertujuan untuk memperkuat program pembangunan fisik di Desa Tugumukti. Dengan penguatan kapasitas jejaring struktur ini, informasi terkait program pembangunan fisik dapat tersampaikan kepada

individu, keluarga, masyarakat dan struktur sosial di masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tugumukti dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, seperti :

- 1) Memperkuat peran gabungan struktur terkecil pemerintahan yang menjadi fasilitator seperti RT, RW, Karang Taruna dan PKK dalam melakukan tindakan pengawasan (*control*) terhadap kinerja Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti dengan selalu ikut terlibat langsung pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik dan memberikan tindakan koreksi terhadap setiap keputusan yang dianggap melenceng dari prinsip transparansi, akuntabel dan responsif.

7.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan, agar Kepala Desa beserta jajarannya di Kantor Desa semakin menjalin hubungan yang baik dengan gabungan struktur terkecil pemerintahan atau wakil-wakil masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT), dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Tugumukti, sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di

- masa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program pembangunan fisik di Desa Tugumukti..
2. Diharapkan pemerintah desa dapat tetap membangun kesadaran kepada masyarakat sehingga terlibat dalam proses pembangunan dan menjadi aktif berpartisipasi dalam setiap pembangunan fisik desa, melalui penguatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat dapat lebih menyadari betapa pentingnya peran partisipasi dalam pembangunan fisik di Desa Tugumukti.
 3. Sebaiknya Kepala Desa beserta aparaturnya dan tentunya masyarakat Desa Tugumukti senantiasa untuk dapat ikut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan intensitas pemeliharaan hasil pembangunan fisik yang telah dihasilkan. Karena setiap tahapan pembangunan di desa harus ada sinergitas antara pemerintahan desa dan masyarakat mulai dari proses pembahasan program pembangunan sampai dengan pemeliharaan hasil program pembangunan, sebab yang harus menjadi penerima manfaat sekaligus memelihara hasil pembangunan desa adalah aparatur pemerintahan dan semua masyarakat desa itu sendiri.
 4. Diharapkan pemerintah desa dapat mengoptimalkan kembali prinsip transparansi dalam penentuan prioritas kebijakan pembangunan fisik yang akan dimasukkan ke APBDes supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang perlu segera ditangani dilingkungan masyarakat sehingga nantinya dalam setiap pelaksanaan kebijakan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
 5. Diharapkan pemerintah desa dapat mengoptimalkan kembali tingkat responsivitas dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti dengan membentuk tim khusus yang menampung dan memproses tindakan koreksi dari masyarakat pada setiap pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tugumukti.
 6. Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat meningkatkan perannya dalam menampung serta menyalurkan sepenuhnya aspirasi atau keinginan masyarakat dengan mengetahui secara baik mengenai kesiapan masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana yang ada, serta menggali potensi mana yang perlu dikembangkan dimasing-masing wilayah dengan melakukan survey atas usulan-usulan masyarakat yang masuk. Ketika BPD mengetahui secara baik mengenai permasalahan di wilayah masing-masing, selain bisa memfilter usulan-usulan masyarakat yang masuk yang sesuai dengan prioritas kebutuhan wilayahnya masing-masing, BPD juga bisa menentukan arah pembangunan mana yang tepat untuk masyarakat berdasarkan fakta dan keadaan hasil survei tersebut, sehingga arah pembangunan yang ditentukan

BPD otomatis mendapat dukungan masyarakat sehingga stigma masyarakat mengenai pelaksanaan musyawarah yang hanya sekedar formalitas saja bisa hilang di lingkungan masyarakat.

7. Sebaiknya pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah desa semata, tetapi juga menuntut keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, secara umum partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anggara, Sahya.(2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia

Juliantara, Dadang.(2002). *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Rahardjo Adisasmata.(2013). *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu (Hal.17)

Sudriamunawar. (2006). *Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas*. Bandung : CV Mandar Maju.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta,

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat.

SUMBER LAIN

BPS-*Statistik of Bandung Barat Regency*, Publication Number : 32170.2303

Karnita.(2017). *Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis*.

Kusen, Sesilia Kristina dkk. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Vol.1, No. 2, ISSN: 2088-2815

Kusnadi. *Modul Pembelajaran Mata kuliah Riset Dalam Praktek (RISTEK) Administrasi Negara STIA Cimahi*

Wahyuningsi (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*.

